



Strategi Kolaborasi Tentara Nasional Indonesia Dan Angkatan Tentera Malaysia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Asia Tenggara

Kamarulzaman bin Kamaruddin

Universitas Pertahanan RI

kamarulzaman3954@gmail.com

Abstract. *This study examines the defense collaboration strategy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Malaysian Armed Forces (ATM) in addressing non-traditional security threats in Southeast Asia. Using a descriptive qualitative approach and multi-level theoretical analysis, the research highlights the significance of bilateral cooperation in countering cybercrime, transnational terrorism, and maritime piracy. Findings indicate that TNI-ATM cooperation has advanced through joint exercises, the High Level Committee (HLC) forum, cyber defense coordination, and defense education programs. However, structural and technical gaps, along with strategic trust issues, remain challenges to be addressed through improved interoperability and defense diplomacy. The study concludes that defense collaboration serves as a crucial foundation for achieving collective security in Southeast Asia.*

Keywords: *Defense collaboration, TNI, ATM, non-traditional security, Southeast Asia*

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis teoritis multi-level, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman seperti kejahatan siber, terorisme lintas batas, dan perompakan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi TNI-ATM telah berkembang melalui mekanisme latihan gabungan, forum *High Level Committee* (HLC), serta kerja sama siber dan pendidikan pertahanan. Meski demikian, hambatan struktural, teknis, dan kepercayaan strategis masih perlu diatasi melalui penguatan interoperabilitas dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi pertahanan menjadi fondasi penting bagi keamanan kolektif di Asia Tenggara.

Kata kunci: Kolaborasi pertahanan, TNI, ATM, keamanan non-tradisional, Asia Tenggara

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, konsep ancaman keamanan mengalami pergeseran mendasar dari ancaman militer konvensional menuju bentuk ancaman yang bersifat non-tradisional. Kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan keamanan yang kompleks seperti terorisme, kejahatan lintas negara, perompakan laut, penyelundupan manusia, serangan siber, dan migrasi ilegal yang memerlukan respons lintas batas serta kolaborasi antarpemerintah. Data dari berbagai lembaga regional menunjukkan bahwa ancaman tersebut meningkat signifikan dalam satu dekade

terakhir. Laporan ASEAN *Counter Terrorism* (2023) mencatat lebih dari 600 kasus terorisme yang berkaitan dengan jaringan ekstremis di Indonesia dan Filipina, sementara laporan UNODC (2022) menunjukkan peningkatan penyelundupan senjata dan narkoba melalui jalur laut strategis seperti Selat Malaka dan Laut Sulu.

Perkembangan ancaman ini mendorong dua negara utama di kawasan, Indonesia dan Malaysia, untuk memperkuat kerja sama pertahanan melalui mekanisme bilateral dan multilateral. Kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menjadi contoh konkret diplomasi pertahanan yang menekankan pentingnya interoperabilitas, koordinasi, dan kepercayaan strategis. Kerja sama ini diwujudkan melalui operasi seperti Patroli Terkoordinasi MALINDO, *Malacca Straits Patrol* (MSP), *High Level Committee* (HLC), serta keterlibatan aktif dalam forum Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM dan ADMM-Plus).

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan mendasar yang menghambat efektivitas kolaborasi, antara lain perbedaan struktur komando, keterbatasan interoperabilitas alat utama sistem senjata, dan sensitivitas dalam berbagi informasi intelijen. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi kolaboratif baru yang adaptif dan berorientasi jangka panjang untuk menghadapi ancaman non- tradisional secara kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaborasi TNI dan ATM dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di Asia Tenggara dengan menggunakan pendekatan teori multi-level: teori keamanan kolektif, diplomasi kekuatan menengah, teori peran negara, teori politik birokrasi, dan teori proses organisasi. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan strategi pertahanan kawasan, serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan di Kementerian Pertahanan kedua negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan fokus pada analisis teoritis dan empiris terhadap pola kolaborasi pertahanan antara TNI dan ATM. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara daring, studi literatur dan studi dokumen resmi.

Analisis data dilakukan secara analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan menekankan triangulasi antara teori, data lapangan, dan literatur akademik. Proses verifikasi keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, memastikan bahwa interpretasi hasil penelitian valid dan representatif.

Dalam kerangka teori, penelitian ini mengintegrasikan tiga lapis pendekatan analisis:

- a. Tingkat makro (*Grand Theory*): Neorealisme dan Studi Keamanan

Kritis (Critical Security Studies) menjelaskan motivasi strategis negara.

- b. Tingkat menengah (*Middle-range Theory*): Teori Keamanan Kolektif dan Diplomasi Kekuatan Menengah menggambarkan bentuk hubungan bilateral dan multilateral.
- c. Tingkat mikro (*Applied Theory*): Teori Peran, Politik Birokrasi, dan Proses Organisasi digunakan untuk memahami dinamika internal dan operasional dalam kolaborasi TNI–ATM.

PEMBAHASAN

Dinamika Ancaman Non-Tradisional di Asia Tenggara.

Dalam dua dekade terakhir, Asia Tenggara telah berkembang menjadi kawasan dengan kompleksitas ancaman yang tidak lagi bersifat tradisional atau konvensional. Ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas negara tidak semata berasal dari agresi militer, melainkan dari fenomena lintas batas yang bersifat multidimensional. Ancaman-ancaman seperti terorisme, perompakan laut, kejahatan siber, migrasi ilegal, dan penyelundupan manusia menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keamanan regional.

Selat Malaka, Laut Sulu, dan wilayah perairan Sabah–Kalimantan kini dikategorikan sebagai “hotspot” keamanan maritim internasional. Berdasarkan laporan *International Maritime Bureau (IMB)* tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 25% dalam insiden perompakan di wilayah tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat operasi gabungan seperti *Malacca Straits Patrol (MSP)*, ancaman perompakan dan penyelundupan belum sepenuhnya dapat diatasi. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya jaringan terorisme lintas negara seperti ISIS, Abu Sayyaf, dan Jemaah Islamiyah yang beroperasi di wilayah perbatasan laut yang sulit diawasi.

Ancaman di ranah digital tidak kalah signifikan. Laporan *ASEAN Cybersecurity Centre* tahun 2023 mencatat ribuan serangan siber yang menasar sistem pertahanan dan pemerintahan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia. Serangan tersebut tidak hanya mengincar data militer, tetapi juga infrastruktur strategis seperti jaringan komunikasi, sistem logistik, dan fasilitas energi nasional. Serangan siber bersifat asimetris karena dapat dilancarkan oleh aktor non-negara tanpa keterlibatan militer langsung, sehingga menimbulkan ketidakpastian baru dalam konsep pertahanan nasional.

Selain ancaman siber dan kejahatan lintas negara, bencana alam dan perubahan iklim juga menimbulkan dimensi baru dalam keamanan non-tradisional. Asia Tenggara termasuk dalam kawasan dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dengan sekitar 70% penduduknya tinggal di wilayah rawan banjir, gempa, dan topan. Bencana seperti tsunami Aceh 2004, topan Haiyan di Filipina, dan gempa Lombok 2018 membuktikan



pentingnya kesiapan militer dalam operasi kemanusiaan lintas batas. Dalam konteks inilah, kemampuan TNI dan ATM dalam melaksanakan *Military Operations Other Than War* (MOOTW) menjadi semakin relevan untuk menjaga keamanan manusia (*human security*).

Dengan demikian, lanskap ancaman non-tradisional di Asia Tenggara menuntut kolaborasi pertahanan lintas negara yang adaptif, interoperabel, dan berbasis kepercayaan strategis. TNI dan ATM menjadi dua aktor utama yang memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga.

Evolusi Kolaborasi TNI–ATM.

Kerja sama pertahanan Indonesia–Malaysia telah melewati perjalanan panjang yang menunjukkan transformasi dari sekadar koordinasi taktis menjadi kemitraan strategis yang terstruktur. Setelah berakhirnya konfrontasi tahun 1966, hubungan militer kedua negara perlahan membaik dan mulai difokuskan pada upaya menjaga stabilitas di perbatasan darat dan laut. Sejak tahun 1972, operasi Patroli Terkoordinasi MALINDO menjadi tonggak kerja sama bilateral pertama antara TNI dan ATM dalam pengawasan perbatasan Kalimantan.

Pada dekade 1990-an, kedua negara memperluas kerja sama militer ke tingkat operasional melalui Latihan Gabungan MALINDO DARSASA dan Latihan Elang MALINDO. Tujuan latihan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan, tetapi juga untuk memperkuat interoperabilitas taktis dan pemahaman doktrin masing-masing angkatan bersenjata. Selanjutnya, kerja sama tersebut berkembang ke arah multilateral dengan pembentukan *Malacca Straits Patrol* (MSP) pada tahun 2004 bersama Singapura dan Thailand. MSP terbukti efektif menurunkan tingkat kejahatan maritim hingga 80% dalam sepuluh tahun pertama pelaksanaannya.

Kolaborasi TNI dan ATM tidak terbatas pada aspek maritim semata. Kedua negara juga berperan aktif dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB. Pasukan Indonesia dan Malaysia ditempatkan di berbagai misi, seperti di Lebanon (UNIFIL) dan Sudan (UNMIS), yang menjadi ajang pembelajaran taktis dan simbol solidaritas internasional. Melalui keterlibatan ini, TNI dan ATM tidak hanya memperkuat kapasitas militernya, tetapi juga memperluas pengakuan internasional terhadap profesionalisme prajurit kedua negara.

Selain itu, kerja sama bilateral juga ditingkatkan melalui *High Level Committee* (HLC) yang berfungsi sebagai forum strategis tingkat tinggi untuk merumuskan kebijakan pertahanan bersama. HLC menjadi wadah penting untuk membahas isu-isu seperti perbatasan, pertukaran intelijen, serta rencana latihan dan pendidikan militer bersama. Kehadiran forum HLC membuktikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara telah beranjak dari sifat ad-hoc menuju format yang lebih institusional dan berkesinambungan.

Analisis Teoretis Multi-Level.

- a. Neorealisme dan Keamanan Kritis. Dalam perspektif Neorealisme, kolaborasi TNI dan ATM merupakan strategi rasional untuk mempertahankan keamanan nasional dalam sistem internasional yang anarkis. Setiap negara dituntut membangun kapasitas pertahanan guna mempertahankan eksistensinya (Waltz, 1979). Dengan berbagi perbatasan laut dan darat yang luas, Indonesia dan Malaysia memiliki insentif tinggi untuk membangun aliansi pertahanan yang mampu menekan ancaman eksternal maupun non-negara.
- b. Namun, kerangka Studi Keamanan Kritis (Ken Booth) memperluas pandangan tersebut dengan menekankan konsep keamanan manusia (*human security*). Menurut Booth, keamanan sejati tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan suatu negara melindungi warganya dari ancaman struktural seperti kemiskinan, kejahatan lintas negara, dan bencana. Dalam konteks ini, kerja sama TNI–ATM tidak hanya menjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat di wilayah perbatasan yang rentan terhadap kejahatan transnasional dan konflik sosial.
- c. Keamanan Kolektif dan Diplomasi Kekuatan Menengah. Teori Keamanan Kolektif menekankan prinsip bahwa serangan terhadap satu negara dianggap sebagai ancaman bagi seluruh komunitas internasional (Mingst & Arreguín-Toft, 2017). Kolaborasi pertahanan bilateral seperti MSP dan PATKOR MALINDO menjadi bentuk konkret penerapan prinsip ini dalam skala regional. Keamanan kolektif juga tercermin dalam keterlibatan kedua negara di forum ADMM dan ADMM-Plus, yang menjadi wadah koordinasi strategis bagi seluruh negara ASEAN dan mitra eksternal seperti Jepang, Tiongkok, dan Australia.
- d. Sementara itu, Diplomasi Kekuatan Menengah (*Middle Power Diplomacy*) menjelaskan kemampuan Indonesia dan Malaysia dalam memainkan peran penyeimbang di antara kekuatan besar dunia. Melalui diplomasi pertahanan, kedua negara berupaya menjaga otonomi strategis kawasan dari pengaruh eksternal, sambil mempromosikan kerja sama yang berbasis kesetaraan dan solidaritas regional.
- e. Teori Mikro: Peran, Birokrasi, dan Proses Organisasi. Pada tingkat mikro, kolaborasi pertahanan sangat dipengaruhi oleh dinamika internal masing-masing negara. Teori Peran (Holsti, 1970) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dibentuk oleh persepsi elite terhadap peran negaranya di dunia. Indonesia dan Malaysia sama-sama melihat diri mereka sebagai penjaga stabilitas kawasan (*regional stabilizer*) yang berkomitmen pada keamanan bersama.
- f. Sementara Teori Politik Birokrasi (Allison, 1971) menyoroti bahwa

kebijakan pertahanan merupakan hasil kompromi antar-lembaga. Dalam konteks ini, keputusan kolaboratif antara TNI dan ATM tidak terlepas dari interaksi antara Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI/ATM, dan lembaga intelijen. Sedangkan Teori Proses Organisasi menjelaskan rutinitas kegiatan seperti latihan gabungan dan pertukaran perwira yang berjalan secara sistematis karena telah menjadi bagian dari mekanisme organisasi militer kedua negara.

Hambatan Kolaborasi.

Walaupun kolaborasi berjalan baik, terdapat beberapa kendala yang masih membatasi efektivitasnya:

- a. Struktur komando dan doktrin militer yang berbeda, Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan operasi gabungan antara TNI dan ATM adalah perbedaan struktur komando dan sistem pengendalian operasi. Masing-masing angkatan memiliki hierarki dan rantai komando yang berbeda, sehingga proses koordinasi sering kali memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam operasi seperti Patroli Terkoordinasi MALINDO atau *Malacca Straits Patrol* (MSP), perbedaan tingkat otoritas di lapangan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan taktis. Misalnya, keputusan operasi yang di satu pihak dapat diambil oleh komandan sektor, pada pihak lain memerlukan persetujuan dari markas besar. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas operasi gabungan, terutama ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut respons cepat. Untuk itu, mekanisme koordinasi lintas komando perlu diperkuat melalui pembentukan *Joint Command Liaison* atau *Combined Task Force* yang memiliki kewenangan operasional bersama di wilayah tertentu.
- b. Keterbatasan interoperabilitas teknologi dan sistem komunikasi militer. Hambatan berikutnya terletak pada keterbatasan interoperabilitas teknologi dan sistem persenjataan. Baik TNI maupun ATM menggunakan berbagai jenis alutsista yang berasal dari negara pemasok yang berbeda, seperti Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, dan Eropa. Perbedaan standar teknis dan sistem komunikasi elektronik membuat integrasi dalam operasi gabungan menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, dalam operasi maritim di Selat Malaka, masih terdapat kesenjangan dalam sistem radar, sonar, dan komunikasi data yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pelacakan target secara simultan. Selain itu, sistem logistik dan pemeliharaan alutsista yang berbeda juga memperlambat proses koordinasi lapangan. Upaya peningkatan interoperabilitas perlu dilakukan melalui pengembangan sistem komunikasi gabungan (*Combined Communication System*) dan penyusunan Standar

Prosedur Operasi Gabungan (*Combined SOP*) yang dapat digunakan bersama oleh kedua angkatan.

c. Sensitivitas dalam berbagi informasi intelijen. Isu sensitif lain yang menjadi penghambat adalah keraguan dalam berbagi informasi intelijen strategis. Kedua negara memiliki sistem keamanan nasional yang berbeda serta tingkat kerahasiaan data yang tinggi. Akibatnya, pertukaran informasi, terutama yang berkaitan dengan ancaman maritim, siber, dan terorisme, sering kali dilakukan secara terbatas. Kondisi ini menimbulkan *trust deficit* atau defisit kepercayaan strategis yang menghambat efektivitas kolaborasi di tingkat operasional. Dalam konteks ancaman non-tradisional seperti terorisme lintas negara, keterlambatan informasi intelijen dapat berakibat fatal terhadap keamanan kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembentukan *Joint Intelligence Sharing Protocol* di bawah koordinasi forum *High Level Committee* (HLC), yang memungkinkan pertukaran data dilakukan secara aman, cepat, dan terverifikasi.

d. Perbedaan Doktrin dan Filosofi Militer. Perbedaan doktrin dan filosofi militer juga menjadi faktor yang memengaruhi sinergi dalam latihan gabungan dan pendidikan militer. TNI lebih banyak menekankan konsep Pertahanan Semesta (*Total Defence*) yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sedangkan ATM berorientasi pada konsep Pertahanan Menyeluruh Negara (HANRUH) yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan militer formal dan mobilisasi terencana. Perbedaan filosofi ini berimplikasi pada perbedaan pola pelatihan, taktik lapangan, dan persepsi terhadap peran militer dalam pembangunan nasional. Akibatnya, meskipun latihan bersama sering dilakukan, tingkat pemahaman doktrin antarmatra belum sepenuhnya selaras. Sebagai solusi, harmonisasi doktrin dapat dicapai melalui penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama (*Joint Defence Education Program*) antara SESKO TNI dan Maktab Turus Angkatan Tentera (MTAT), Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) dan Maktab Ketahanan ATM serta pertukaran tenaga pengajar dalam bidang strategi dan operasi pertahanan.

e. Hambatan Psikologis dan Isu Historis. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan pertahanan Indonesia–Malaysia masih dibayangi oleh faktor psikologis dan sejarah masa lalu. Isu-isu seperti sengketa wilayah perbatasan Ambalat atau perbedaan persepsi terhadap kebijakan luar negeri terkadang menimbulkan sensitivitas yang memengaruhi hubungan militer. Meskipun kedua negara telah berkomitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur diplomatik, residu psikologis ini masih terasa dalam komunikasi strategis dan koordinasi tingkat lapangan. Peningkatan *strategic trust* menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini. Program seperti *Junior Officer Exchange*

Program (JOEP) dan Senior Officer Exchange Program (SOEP) memiliki peran penting dalam mempererat hubungan interpersonal antarprajurit dan pejabat militer, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan institusional antara kedua angkatan bersenjata.

Upaya Strategis dan Inovasi Kolaboratif.

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, TNI dan ATM telah menerapkan berbagai strategi inovatif:

a. Penguatan Mekanisme Koordinasi melalui Forum *High Level Committee* (HLC). Forum *High Level Committee* (HLC) menjadi platform utama bagi kedua negara untuk membahas isu-isu strategis terkait keamanan perbatasan, latihan militer bersama, dan pertukaran intelijen. HLC berfungsi sebagai policy-coordinating mechanism yang menjembatani antara tingkat kebijakan nasional dan pelaksanaan taktis di lapangan. Dalam pertemuan-pertemuan HLC, para pejabat tinggi pertahanan Indonesia dan Malaysia menyepakati langkah-langkah konkret dalam bidang patroli laut, latihan bersama, dan pertukaran perwira. Forum ini juga memainkan peran penting dalam menyelaraskan prioritas strategis kedua negara agar sejalan dengan kerangka *Comprehensive Security* ASEAN. HLC telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi tumpang tindih birokrasi dan meningkatkan efisiensi koordinasi operasional antarinstansi militer.

b. Transformasi Digital dan Pertahanan Siber. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, kedua negara menyadari pentingnya transformasi digital dalam bidang pertahanan. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertahanan Bilateral tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan aspek pertahanan siber ke dalam kerja sama militer TNI–ATM.

MoU tersebut memuat komitmen untuk membangun sistem keamanan siber terpadu, pertukaran pakar teknis, serta pelaksanaan pelatihan bersama di bidang *Cyber Defence* dan *Early Warning System*.

Dengan adanya sistem ini, kedua negara dapat lebih cepat mendeteksi potensi ancaman digital terhadap sistem pertahanan dan infrastruktur vital nasional. Kolaborasi ini juga berperan penting dalam menciptakan kepercayaan strategis di dunia maya, yang menjadi ruang baru bagi kompetisi geopolitik abad ke-21.

c. Peningkatan Kapasitas Personel melalui Program Pertukaran Perwira. Salah satu bentuk inovasi yang paling berpengaruh adalah program JOEP dan SOEP. Program ini memberikan kesempatan kepada perwira muda dan senior dari kedua angkatan untuk saling bertukar pengalaman operasional, doktrin pertahanan, serta pendekatan strategis dalam menghadapi ancaman kontemporer.

Selain memperkuat *people-to-people contact*, program ini berfungsi sebagai sarana diplomasi pertahanan yang membangun saling pengertian antar pemimpin masa depan kedua angkatan. Hubungan personal yang terbentuk dari program ini terbukti meningkatkan koordinasi di lapangan, karena komunikasi antara satuan operasi menjadi lebih terbuka dan berbasis kepercayaan.

d. Latihan Gabungan dan Operasi Multinasional. Pelaksanaan Latihan Gabungan MALINDO DARSASA, ELANG MALINDO, dan LATMA MALINDO JAYA terus berlanjut sebagai wadah pengujian interoperabilitas pasukan kedua negara. Fokus latihan kini tidak hanya pada operasi tempur, tetapi juga operasi non-perang seperti penanggulangan bencana, penyelamatan kemanusiaan, dan evakuasi warga negara di wilayah konflik.

Keterlibatan TNI dan ATM dalam *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) bersama Filipina dan *Malacca Straits Patrol* (MSP) bersama Singapura dan Thailand menegaskan kontribusi kedua negara dalam arsitektur keamanan maritim kawasan. Kegiatan ini memperkuat sistem *Maritime Domain*

Awareness (MDA) melalui pertukaran data radar dan sistem C4ISR yang memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman perompakan dan penyelundupan.

e. Inovasi Institusional dan Pendidikan Pertahanan. Selain inovasi operasional, kolaborasi TNI–ATM juga berkembang dalam bidang kelembagaan pendidikan militer. Kerja sama antara SESKO TNI, Maktab Turus ATM (MPAT), dan Lemhannas RI dalam seminar, kursus, dan pertukaran pengajar telah memperluas basis pengetahuan strategis dan memperkuat kesadaran akan pentingnya budaya pertahanan bersama (*shared strategic culture*).

Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari kerja sama berbasis ancaman menjadi kerja sama berbasis pembelajaran dan pengembangan kapasitas jangka panjang. Dengan kata lain, TNI dan ATM kini tidak hanya bekerja sama dalam menghadapi ancaman, tetapi juga dalam membangun ketahanan institusional untuk masa depan.

f. Diplomasi Pertahanan dan Perluasan Jejaring Regional. Keterlibatan aktif TNI dan ATM dalam forum multilateral seperti ADMM, ADMM-Plus memperlihatkan bagaimana kolaborasi bilateral dapat menjadi model diplomasi pertahanan di tingkat regional. Kedua negara memainkan peran penting dalam merumuskan agenda keamanan kawasan, terutama yang berkaitan dengan *humanitarian assistance*, *disaster relief*, dan *cyber cooperation*.

Melalui pendekatan ini, TNI dan ATM tidak hanya memperkuat posisinya di kancah ASEAN, tetapi juga membangun reputasi sebagai aktor regional yang mendorong keamanan kolektif berbasis kepercayaan dan solidaritas.

Model Strategi Kolaborasi Pertahanan.

Untuk memastikan kolaborasi TNI dan ATM berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan suatu model strategi kolaboratif yang terstruktur dan berorientasi masa depan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dalam penelitian ini, model tersebut dibangun di atas empat pilar strategis utama: interoperabilitas, koordinasi komando, kepercayaan strategis, serta pendidikan dan profesionalisme militer.

a. Pilar 1: Interoperabilitas dan Integrasi Teknologi. Interoperabilitas merupakan syarat utama keberhasilan operasi gabungan. TNI dan ATM perlu mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi Gabungan yang memungkinkan pertukaran data secara cepat dan aman. Selain itu, dibutuhkan integrasi sistem C4ISR agar kedua angkatan mampu merespons ancaman lintas batas dengan efisien.

Langkah strategis yang disarankan adalah pembentukan *Combined Command Centre* (CCC) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi operasi darat, laut, udara, dan siber. CCC ini akan memperkuat kemampuan *situational awareness* di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi platform berbagi data real-time antar satuan operasi.

b. Pilar 2: Koordinasi Kebijakan dan Komando Terpadu. Perbedaan struktur komando antara TNI dan ATM sering menimbulkan kendala dalam pelaksanaan operasi gabungan. Oleh karena itu, perlu dibentuk *Bilateral Defence Coordination Cell* (BDCC) sebagai lembaga koordinatif permanen di bawah HLC. BDCC berfungsi sebagai unit penghubung yang menyinergikan kebijakan operasional, menyusun rencana latihan tahunan, serta mengkoordinasikan respons krisis bilateral.

Keberadaan BDCC juga diharapkan dapat memperkuat *command unity* di lapangan, sehingga setiap keputusan operasional dapat diambil secara cepat tanpa mengorbankan kedaulatan masing-masing negara.

c. Pilar 3: Kepercayaan Strategis dan Diplomasi Pertahanan. Kepercayaan strategis menjadi elemen kunci dalam mempertahankan stabilitas kolaborasi. TNI dan ATM perlu memperluas diplomasi pertahanan melalui pertemuan rutin antar panglima angkatan, kunjungan kehormatan, serta dialog strategis tahunan.

Diplomasi pertahanan yang intensif akan membangun hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin militer kedua negara, mengurangi kesalahpahaman strategis, dan menciptakan lingkungan kerja sama yang transparan. Kepercayaan yang kokoh juga akan memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai pilar utama keamanan kawasan ASEAN.

d. Pilar 4: Pendidikan dan Pelatihan Militer Bersama. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan kerja sama pertahanan.

Standardisasi kurikulum antara SESKO TNI dan Maktab Pertahanan ATM perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman pemahaman tentang doktrin, strategi, dan konsep pertahanan kolektif.

Selain itu, pelatihan gabungan dalam bidang pertahanan siber, logistik, dan operasi kemanusiaan perlu diperluas agar personel kedua negara terbiasa bekerja dalam sistem multinasional. Program ini dapat menghasilkan kader perwira yang berpikir strategis, berorientasi kolaborasi, dan memahami dinamika keamanan lintas negara.

e. Pilar 5: Sinergi Institusional dan Diplomasi Akademik. Selain empat pilar utama, strategi kolaborasi pertahanan ideal juga memerlukan dukungan sinergi kelembagaan. Kolaborasi antar lembaga pendidikan pertahanan seperti Universitas Pertahanan RI, *National Defence University of Malaysia* (NDUM), dan Lemhannas RI menjadi platform akademik untuk memperkuat diplomasi pertahanan melalui riset bersama dan publikasi ilmiah.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas analisis strategis, tetapi juga memperluas pemahaman terhadap konsep keamanan komprehensif di Asia Tenggara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara TNI dan ATM merupakan kebutuhan strategis yang tidak hanya memperkuat keamanan nasional masing-masing, tetapi juga menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Strategi kolaboratif yang adaptif, berbasis interoperabilitas dan kepercayaan strategis, menjadi kunci dalam menghadapi ancaman non- tradisional seperti terorisme, kejahatan maritim, dan siber.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hubungan pertahanan bilateral di kawasan Asia Tenggara, sedangkan secara praktis, ia menawarkan kerangka kebijakan bagi kedua kementerian pertahanan untuk memperkuat mekanisme kerja sama yang lebih efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan pertahanan di Indonesia dan Malaysia. Pertama, kedua negara perlu memperkuat fondasi kelembagaan kolaborasi dengan membentuk lembaga koordinatif tetap seperti *Bilateral Defence Coordination Cell* (BDCC) yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi gabungan. Kedua, disarankan agar



dilakukan standardisasi kurikulum pendidikan militer antara SESKO TNI dan Maktab Pertahanan ATM untuk menyatukan pemahaman doktrin dan strategi pertahanan kolektif.

Ketiga, diperlukan pengembangan sistem pertahanan siber bersama guna menghadapi ancaman digital yang semakin meningkat. Kerja sama dalam bidang ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan strategis kedua negara. Keempat, perlu ditingkatkan latihan gabungan lintas matra dan kegiatan penelitian strategis bersama untuk memperluas interoperabilitas dan memperdalam pemahaman terhadap ancaman kawasan.

Akhirnya, kedua negara perlu memperluas diplomasi pertahanan di tingkat ASEAN agar kolaborasi TNI–ATM dapat menjadi model kerja sama regional yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Monograf Akademik

- Allison, G. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: HarperCollins.
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). *DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR)*.
- Anwar, D. F. (2020). *Indonesia and the ASEAN Security Community*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). *UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA*.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collins, A. (2000). *Security Cooperation in the Straits of Malacca and Singapore*. London: Routledge.
- Goh, E. (2019). *Developing Regional Security Architecture in Southeast Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Holsti, K. (1970). *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Jordaan, E. (2003). *The Concept of a Middle Power in International Relations*.



London: Palgrave Macmillan.

Mingst, K. A., & Arreguín-Toft, I. (2017). *Essentials of International Relations* (8th ed.). New York: W. W. Norton & Company.

Rabasa, A., & Chalk, P. (2001). *Southeast Asian Security Challenges: The Future of Stability and Terrorism*. Santa Monica: RAND Corporation.

Snyder, G. H. (1997). *Alliance Politics*. Ithaca: Cornell University Press.

Storey, I. (2009). *Southeast Asia and the Rise of China: The Search for Security*.

London: Routledge.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison- Wesley.

Yarger, H. R. (2006). *The Strategy Bridge: Theory for Practice*. Carlisle: U.S. Army War College Press.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik

Acharya, A. (2014). “Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order.” *Asian Survey*, 54(2), 251–273.

Booth, K. (1991). “Security and Emancipation.” *Review of International Studies*, 17(4), 313–326.

Buszynski, L. (2018). “ASEAN’s Evolving Role in Southeast Asian Security.” *Contemporary Southeast Asia*, 40(3), 401–424.

Goh, E. (2008). “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia.” *International Security*, 32(3), 113–157.

Waruwu, E., Purwanto, S., & Widodo, M. D. A. (2025). Strategi Pembinaan Mental Tradisi Kejuangan Prajurit Terhadap Situasi Global Guna Mendukung Tugas TNI AU. *Journal of Law & Policy Review*, 3(1), 109-118.

Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).

Purwanto, S., Wibowo, A., & Suharti, T. (2023). The OCB Determinant of Employees in Non-Profit Organization; Leadership Role and Work Engagement. *inovator*, 12(2), 251-263.

Tan, S. S. (2015). “Conscripting Ideas: The Role of Academics in Security Policy Formulation in Singapore.” *Pacific Review*, 28(5), 749–772